

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia dan Australia telah menjalin hubungan diplomatik sejak lama, secara resmi hubungan ini dijalin sejak 1949. Namun, Australia menjadi salah satu negara yang secara terbuka mengakui kedaulatan Indonesia dan tidak ragu dalam memberikan bantuan saat Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya (Kedutaan Besar Australia, 2010). Secara geografis, Indonesia dan Australia merupakan negara tetangga. Selain itu, Australia telah mengidentifikasi Indonesia sebagai salah satu mitra utama dalam sektor pendidikan dan ekonomi. Hal ini dilatarbelakangi atas pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi muda, dan teridentifikasinya kebutuhan atas peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan dan penelitian di Indonesia. Argumen ini didukung oleh pernyataan dari Marise Payne selaku Menteri Luar Negeri Australia yang menyatakan bahwa Indonesia dan Australia merupakan dua negara dengan ekonomi terbesar di kawasan sehingga masih terdapat banyak potensi dalam peningkatan hubungan perdagangan dan investasi (Wibawa, 2020).

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun secara geografis lokasi kedua negara berdekatan, Indonesia dan Australia memiliki perbedaan dalam berbagai hal mulai dari politik, sosial hingga kebudayaan. Oleh karena itu, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia tidak selalu dipenuhi dengan hubungan yang harmonis dan positif. Tidak jarang pula kedua negara mengalami fase hubungan yang dipenuhi 'kegaduhan'. Australia memiliki berbagai kekhawatiran terhadap Indonesia yang dinilai akan mengancam keamanan kawasan, seperti potensi serangan dari militer Indonesia, munculnya "Islam ekstremis" di kawasan, hingga datangnya para pencari suaka dari wilayah konflik di Indonesia (Setyawati, 2015). Rasa khawatir ini semakin diperparah dengan minimnya pengetahuan masyarakat Australia terhadap negara Indonesia.

Di dalam hubungan internasional yang dipenuhi oleh perbedaan, maka menjadi penting dilaksanakannya diplomasi sebagai upaya penyelarasan perbedaan. Dalam

hal ini diplomasi menjadi bagian dalam berbagai aktivitas negosiasi, penyelesaian konflik, hingga kerjasama yang terjalin diantara negara. Berbicara mengenai diplomasi, Morgenthau membaginya menjadi 2 (dua) ruang lingkup yaitu dalam artian yang luas serta dalam artian yang lebih sempit. Dalam artian luas, diplomasi dapat dipahami sebagai proses formulasi dan implementasi kebijakan luar negeri dalam berbagai tingkatan, mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Sedangkan dalam ruang lingkup artian yang lebih sempit, diplomasi dapat dipahami sebagai media bagi negara dalam menjalin hubungan secara resmi dengan negara lain (Setiawan, 2016) Menurut Joseph Nye, terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan oleh negara dalam upaya mencapai kepentingan nasionalnya yaitu mengancam pihak lawan dan melakukan perang jika dibutuhkan, “membeli” pihak lain serta menggunakan pendekatan *soft diplomacy* untuk meyakinkan pihak lain (KALIN, 2011)

Dengan berkembangnya globalisasi dan isu-isu dunia internasional yang tidak lagi terbatas pada isu keamanan, telah menjadikan langkah pertama dan kedua yang digagas oleh Nye atau yang kita kenal sebagai aktivitas diplomasi tradisional dengan negara sebagai aktor utama dianggap tidak lagi efektif dan relevan di dalam pelaksanaannya. Jalur di dalam diplomasi secara perlahan semakin meluas dan menggunakan berbagai pendekatan baru di dalam pelaksanaannya seperti melalui sektor budaya, pendidikan, seni, media cetak dan visual, film, karya tulis, organisasi non-pemerintah, pariwisata dan lain sebagainya. Sejak era Perang Dingin, Amerika Serikat telah menyadari bahwa pendekatan tertutup yang hanya melibatkan pemerintah sudah tidak lagi efektif dan opini publik menjadi faktor yang lebih penting di dalam pengelolaan arah kebijakan luar negeri suatu negara (Snow, 2020)

Louise Diamond dan McDonald melakukan ekspansi terhadap paradigma diplomasi tradisional yang hanya melibatkan pemerintah dan para profesional menjadi 9 (sembilan) jalur diplomasi yang dikenal sebagai *multi-track diplomacy*. 9 (sembilan) jalur diplomasi tersebut meliputi pemerintah, resolusi konflik profesional; bisnis; masyarakat; penelitian, pelatihan dan edukasi; aktivisme atau advokasi perdamaian; agama; pendanaan; media dan opini publik (*The Second Decade 2001-2011*, 2011). Dalam hal ini, salah satu jalur yang digunakan oleh Indonesia terhadap Australia ialah *track five* yang esensi di dalamnya meliputi 3

aspek yaitu penelitian, pelatihan dan edukasi. Melalui penelitian ini, peneliti akan berfokus terhadap aspek edukasi di dalam *track five* sebagai pendekatan dalam melihat fenomena dan studi kasus yang peneliti teliti yaitu edukasi melalui kebudayaan (*The Second Decade 2001-2011*, 2011).

Koentjaraningrat (1992) di dalam Zubaidi, dkk (2014) menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sebuah bentuk dari ide, aktivitas maupun hasil karya yang diciptakan oleh individu dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi milik manusia melalui proses belajar (Zubaidi et al., 2014). Di dalam kebudayaan sendiri, Koentjaraningrat membaginya ke dalam tujuh unsur yaitu sistem religi dan upacara keagamaan; sistem dan organisasi kemasyarakatan; sistem pengetahuan; bahasa; kesenian; sistem mata pencaharian hidup serta sistem teknologi dan peralatan (Sumarto, 2019). Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menggunakan salah satu unsur kebudayaan yaitu bahasa sebagai salah satu media dalam pelaksanaan *track five* yaitu edukasi terhadap Australia.

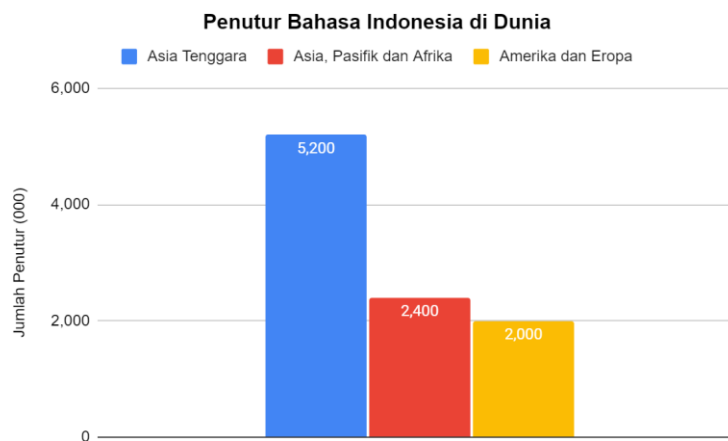
Secara luas, bahasa menjadi media yang digunakan oleh individu dalam melakukan koneksi dalam bentuk mengungkapkan gagasan, pikiran maupun perasaan baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan. Melalui adanya perluasan bahasa, maka suatu negara dapat memperluas pemahaman mengenai kebudayaan, nilai-nilai serta kebiasaan yang dimiliki oleh negaranya sehingga terjalin sebuah diplomasi publik dengan pendekatan yang positif dan mendorong terciptanya keselarasan pemahaman antara satu sama lain. Keesing menyatakan bahwa bahasa akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan manusia dalam membangun sebuah budaya maupun pemahaman terkait fenomena sosial yang kemudian diwariskan terhadap generasi selanjutnya (Sumarto, 2019).

Sejalan dengan hal tersebut, Hernandez menyatakan bahwa bahasa tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi antar individu saja. Menurutnya, bahasa memiliki hubungan yang erat dengan kekuasaan. Dalam perspektif negara bangsa, bahasa nasional merupakan bukti nyata telah terciptanya kesamaan identitas budaya di dalam masyarakat yang mengandung berbagai pemahaman nilai sejarah, kebudayaan serta kebiasaan budaya yang menjadi bagian dari identitas nasional. Sehingga ketika bahasa nasional suatu negara tersebar luaskan maka dapat dilihat sebagai alat dominasi negara di kancah internasional (Hernández, 2018). Oleh

karena itu, bahasa menjadi media yang tepat bagi negara untuk memperluas identitas nasionalnya dalam menciptakan keselarasan pemahaman untuk mencapai kepentingan nasional yang lebih luas.

Sejumlah ahli menyatakan bahwa Bahasa Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat digunakan sebagai bahasa Internasional. Hal ini didukung oleh beberapa faktor keunggulan yang dimiliki oleh Bahasa Indonesia, seperti sistem ejaan bahasa yang sudah mapan dan dibakukan (Widodo, 2022). Melihat potensi Bahasa Indonesia yang terus berkembang, maka terjadi peningkatan fungsi Bahasa Indonesia seperti yang tercantum pada Undang-Undang (UU) No.24/2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, pasal 44 mengenai peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009*, n.d.). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa Bahasa Indonesia merupakan bahasa terbesar di kawasan Asia Tenggara yang persebarannya bahkan telah mencapai hingga 47 negara yang tersebar di kawasan Asia Tenggara, Asia, Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa seperti yang terlampir dalam Grafik 1 (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

**Grafik 1.1 Jumlah Penutur Bahasa Indonesia di Dunia**



**Sumber : Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat, 2022**

Praktik penggunaan bahasa sebagai media diplomasi bukan merupakan hal yang baru. Diplomasi melalui bahasa dapat ditemukan pada berbagai negara di dunia,

seperti Jerman yang memiliki Goethe Institute, Jepang yang memiliki Japan Foundation dan Cina yang memiliki Confucius Institute (Effendi, 2016). Dalam hal ini Cina berhasil membangun *Confucius Institutes* di 104 negara dengan jumlah perkiraan mencapai 353 institusi untuk mempromosikan bahasa serta kebudayaan Cina di negara tujuan (Nazar et al., 2019). Diplomasi publik melalui bahasa juga tak luput dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Sejalan dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang No.24/2009 Pasal 44, maka pemerintah bersama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikburistek melakukan berbagai upaya dalam mencapai internasionalisasi Bahasa Indonesia, salah satunya ialah melalui program pengajaran Bahasa Indonesia untuk penutur asing atau yang dikenal sebagai BIPA. BIPA merupakan sebuah skema pembelajaran kemahiran berbahasa Indonesia, mulai dari berbicara, menulis, membaca dan mendengar bagi para penutur asing. Dalam hal ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendukung pelaksanaan program pengajaran Bahasa Indonesia melalui 3 (tiga) skema besar yaitu pengiriman tenaga pengajar dari Indonesia ke luar negeri, penugasan tenaga kerja lokal yang berdomisili di luar negeri untuk mengajar BIPA, dan pembelajaran jarak jauh secara daring (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).

Australia menjadi salah satu negara dengan jumlah lembaga pembelajaran BIPA terbanyak hingga mencapai 113 lembaga (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021). Bahkan pada 2013, Australia memiliki 36 perguruan tinggi yang terletak di seluruh kawasan untuk mengajarkan Bahasa Indonesia sehingga Australia menjadi salah satu negara dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak. Salah satunya dapat ditemukan pada Monash University yang telah mengajarkan Bahasa Indonesia sejak 50 tahun silam (Badan Bahasa, Kemendikbud, 2013). Namun, jauh sebelum itu, Australia yang merupakan negara tetangga Indonesia telah mengajarkan Bahasa Indonesia sejak tahun 1950-an (Sturak & Naughten, 2010). Komitmen ini terus berlanjut seperti yang dapat ditemukan dalam pasal 1 *Cultural Agreement* antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah *commonwealth* Australia pada 1968, kebijakan *National Policy on Languages* pada 1987, kebijakan *Australian Language and Literacy*

*Policy* pada 1991, serta menjadi salah satu bahasa prioritas dalam strategi *The National Asian Languages and Studies in Australian Schools* (NALSAS) pada 1994 (Sturak & Naughten, 2010).

Strategi NALSAS menjadi salah satu inisiasi pertama Australia dalam pembelajaran Bahasa Asia di kawasan, termasuk Bahasa Indonesia. NALSAS menjadi sebuah tindak lanjut atas rekomendasi di dalam laporan *Asian Languages and Australia's Economic Future* oleh kelompok kerja tingkat tinggi COAG pada 1994 (NALSAS Secretariat, 1998). Dengan adanya inisiasi pembelajaran Bahasa Indonesia di kawasan Australia, pemerintah Indonesia melihatnya sebagai potensi besar dan sebuah pintu terbuka dalam memperkenalkan bangsa Indonesia terhadap masyarakat Australia secara luas. Pembelajaran Bahasa Indonesia ini pada akhirnya menjadi media diplomasi publik Indonesia, terutama pada jalur *track five* di dalam *multi-track diplomacy* yaitu edukasi Bahasa Indonesia untuk para penutur asing (BIPA) yang dilaksanakan di berbagai lembaga pendidikan Australia.

Namun, jumlah pelajar dan pengajaran Bahasa Indonesia di lembaga pendidikan Australia terus menunjukkan penolakan setiap tahunnya. Pada tahun 2001-2010, terjadi penurunan pendaftaran program Bahasa Indonesia sebesar 37% pada tingkat universitas. Bahkan pada New South Wales, kawasan Australia yang paling padat penduduknya mengalami penurunan hingga 50% dalam pengajaran Bahasa Indonesia (Delany et al., 2013). Bahkan diperkirakan bahwa Bahasa Indonesia telah kehilangan sekitar 10.000 pelajar setiap tahunnya sejak tahun 2005. Selain itu, tercatat pula bahwa 99% pelajar Australia yang mempelajari studi Bahasa Indonesia memilih tidak melanjutkan studinya tepat sebelum tahun 12 (Sturak & Naughten, 2010). Victoria yang merupakan kawasan dengan tingkat partisipasi siswa terbesar turut menunjukkan penurunan sejak 2015 hingga tahun 2020 dimana jumlah lembaga pendidikan pemerintah di kawasan Victoria pada tingkatan sekolah dasar mengalami penurunan sebesar 9% dan penurunan sebesar 3% untuk sekolah menengah (Carey, 2021).

Penurunan pada angka pelajar pada tingkatan lembaga pendidikan Australia diyakini disebabkan oleh berbagai hal. George Quinn melalui salah satu tulisannya menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang berkontribusi dalam penolakan Bahasa Indonesia di kawasan Australia. Pertama, kebijakan pemerintahan yang

lemah dan pendanaan yang tidak memadai. Kedua, prasangka anti islam serta kekhawatiran keamanan. Ketiga, pendapatan yang tidak sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk menguasai bahasa. Keempat, pemberitaan yang berprasangka buruk terhadap Indonesia dalam media massa Australia (Quinn, 2012).

Di dalam penelitian ini peneliti berfokus pada pelaksanaan pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing pada lembaga pendidikan Australia terutama yang berhasil diidentifikasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Melalui penelitian ini peneliti bermaksud untuk melihat pengimplementasian pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) di kawasan Australia pada periode 2015-2020 sebagai bagian dari pelaksanaan diplomasi melalui jalur edukasi atau *track five* dengan bahasa sebagai media pelaksanaannya.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Penelitian mengenai penggunaan pendekatan kebudayaan telah dilakukan oleh Putri (2021) yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia berupaya melakukan *people to people contact* dan mempromosikan *cultural understanding* yang akan mengarah pada terciptanya hubungan harmonis antara kedua negara. Hal ini dilakukan oleh Indonesia melalui pelaksanaan program *Australia Indonesia Youth Exchange Program (AIYEP)*, serta sektor kebudayaan khususnya Gamelan. Selain itu, Praditya dan Arisanto (2021) menyatakan bahwa melalui adanya penyeimbangan berbagai unsur budaya nasional sebagai bagian dari *multi-track diplomacy* maka dapat menciptakan *nation branding* yang positif. Dalam hal ini Praditya dan Arisanto memfokuskan penelitiannya terhadap *multi-track diplomacy* yang dilakukan oleh Jepang terhadap Indonesia melalui *nation branding* “Cool Japan Initiative” dengan tujuan untuk melakukan penyebaran budaya dan produk hasil Jepang dengan melibatkan jalur bisnis, media massa dan komunikasi, serta masyarakat sipil dan kelompok kepentingan sebagai aktor pelaksana diplomasi.

Syed, Ahmad dan Bhutta (2019) sepakat dalam hal tersebut. Mereka menyatakan bahwa diplomasi melalui kebudayaan pada umumnya akan menargetkan generasi muda. Maka dari itu, dengan adanya keselarasan pemahaman budaya yang lebih baik di negara lain maka negara tersebut akan mendapatkan efek afirmatif pada generasi muda yang suatu hari nanti beberapa di antara mereka akan menjadi orang berkuasa di negaranya. Selain itu, Syed dan rekannya menyatakan

bahwa melalui pelaksanaan diplomasi kebudayaan akan membuka kesempatan bagi suatu negara untuk mendapatkan akses terhadap masyarakat yang sebelumnya tidak bisa tercapai oleh diplomasi tradisional melalui kedutaan. Dalam penelitian ini, Syed dan rekannya memfokuskan terhadap upaya diplomasi budaya yang dilakukan oleh Pakistan untuk menciptakan citra positif di mata internasional seperti melalui penggunaan media, program pertukaran kebudayaan, olahraga, bahasa, pariwisata, hingga film.

Salah satu unsur yang dapat digunakan dalam diplomasi kebudayaan ialah bahasa, Hernández (2018) menyatakan bahwa bahasa nasional menunjukkan telah terbentuknya kesamaan identitas budaya di dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, ketika suatu bahasa nasional tersebar ke negara lain maka persebaran bahasa nasional tersebut tidak hanya dilihat sebagai proses pembangunan bangsa saja. Namun, hal ini dapat dilihat sebagai alat dominasi suatu negara seperti yang dilakukan oleh Korea dengan mempromosikan pertukaran budaya, pendidikan dan bahasa melalui *Korean Culture Center*. Dalam penelitiannya, Hernández memfokuskan terhadap *Korean Culture Center* yang terletak di kota Meksiko.

Selain itu, Faizal, Surya, dan Dinesia (2020) menyatakan bahwa diplomasi budaya memegang peranan yang sangat penting dalam menjalin hubungan dengan negara lain sebagai bentuk *soft power diplomacy*, salah satunya melalui pengadaan kelas bahasa. Bahasa merupakan salah satu unsur penting di dalam pengembangan hubungan antar dua negara. Melalui bahasa maka negara dapat mengembangkan dan menyebarkan kebudayaan nasionalnya dan menjadikannya sebagai sarana penyampaian informasi yang mencerminkan kebudayaan masyarakat. Di dalam penelitian ini, Faizal dan rekannya berfokus terhadap pelaksanaan kelas bahasa yang dilakukan oleh Indonesia di KBRI Vientiane dan *Wonderful Indonesia Center* (WIC) untuk masyarakat Laos pada 2016-2020.

Secara spesifik, pemerintah Indonesia turut melaksanakan diplomasi melalui bahasa. Firdiansyah, Andayani dan Supriyadi (2018) menyatakan bahwa Bahasa Indonesia memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan berbagai bahasa lainnya terutama yang berada di kawasan ASEAN seperti penggunaan aksara latin dalam bahasa tulis dan tata bahasa dalam bahasa verbal sangat sederhana. Oleh karena itu sebagai upaya internasionalisasi Bahasa Indonesia, pemerintah



meluncurkan program BIPA dengan visi untuk memperluas Bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung dan meningkatkan citra positif Indonesia. Darma, Fasisaka, dan Resen (2018) menyatakan bahwa melalui program BIPA, Indonesia dapat meningkatkan *people to people contact* dan pada waktu yang bersamaan memperluas informasi, berita, atau pun fakta terkait Indonesia, termasuk memperkenalkan budaya serta identitas bangsa Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Thailand sehingga tercipta *nation brand* yang positif di masyarakat Thailand.

Penelitian terkait hubungan kerjasama Indonesia-Australia pun telah banyak dilakukan. Ghoniyya (2021) menyatakan bahwa Indonesia-Australia telah menjalin berbagai kerjasama di antaranya yaitu AusAID dan BRIDGE. Australia telah membantu Indonesia dalam membangun lebih dari 2.000 sekolah menengah di berbagai daerah serta memberikan pelatihan bagi para tenaga pendidik. Sedangkan melalui program BRIDGE atau *Building Relations through Intercultural Dialogue and Growing Engagement* telah mendorong terbentuknya berbagai kerjasama antara lembaga pendidikan Indonesia dan Australia hingga mencapai 164 kerjasama yang melibatkan 592 tenaga pendidik Indonesia dan Australia serta lebih dari 10,000 siswa. Selain itu, Nugroho dan Esther (2022) menyatakan bahwa Indonesia tercatat sebagai mitra pertama bagi Australia dalam sektor pendidikan. Di dalam pelaksanaannya, program *Australia Awards Scholarship Program* (AAS) berfokus pada 7 provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat dengan menawarkan 2 jenis beasiswa program pascasarjana (jangka panjang) dan kursus singkat intensif (jangka pendek).

Penelitian terkait pendidikan bahasa Indonesia di kawasan Australia juga dilakukan oleh Subroto (2013) melalui tulisannya turut menggambarkan pendidikan Bahasa Indonesia di Australia dan menganalisis penurunan minat siswa terhadap bahasa Indonesia. Ia menyatakan bahwa terdapat kecenderungan penurunan pada angka program yang ditawarkan serta siswa yang mempelajari Bahasa Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persepsi negatif masyarakat Australia terhadap Indonesia yang merupakan negara mayoritas muslim dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan langkah yang tepat untuk

mengakselerasi program pengajaran Bahasa Indonesia. Secara spesifik, Henderson (2007) melalui tulisannya, menganalisis mengenai signifikansi pembelajaran Bahasa Asia bagi Australia, termasuk Bahasa Indonesia. Melalui strategi *The National Asian Languages and Studies in Australian Schools* (NALSAS) yang dibentuk berdasarkan hasil pertemuan *Council of Australian Governments* (COAG) bahwa perkembangan Bahasa Asia merupakan sebuah kepentingan nasional yang membutuhkan perhatian tingkat tinggi dan mendesak dimana Asia diakui sebagai kunci regional bagi Australia untuk menghadapi permasalahan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang.

Dari berbagai penelitian terdahulu, peneliti menemukan penelitian terkait pelaksanaan program BIPA di luar negeri. Namun, peneliti belum menemukan analisis terkait pelaksanaan pengajaran Bahasa Indonesia atau program BIPA di kawasan Australia terutama menggunakan pendekatan *multi-track diplomacy* dan hanya berhasil menemukan penelitian terkait pelaksanaan BIPA di kawasan Thailand. Hal ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis secara lebih jauh mengenai pelaksanaan *multi-track diplomacy* Indonesia melalui pelaksanaan program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing di lembaga pendidikan Australia dengan menggunakan konsep *track five* di dalam *multi-track diplomacy* dan *language as power* dalam menganalisis fenomena tersebut.

Berdasarkan keterkaitan antara *multi-track diplomacy* dengan studi kasus program BIPA – Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana *multi-track diplomacy* terhadap Australia dalam upaya internasionalisasi Bahasa Indonesia melalui program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) pada tahun 2015-2020.

## 1.2. Perumusan Masalah

Australia berhasil mengidentifikasi Indonesia sebagai salah satu mitra penting dalam mencapai kepentingan nasionalnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kondisi ini pada akhirnya telah mendorong Australia untuk melaksanakan pengajaran Bahasa Indonesia pada tingkat lembaga pendidikan sejak tahun 1950 dan terus dilakukan hingga Australia meluncurkan strategi NALSAS pada 1994 sebagai langkah pertama dalam mendorong pengajaran Bahasa Asia dan

studi Asia di Australia termasuk Bahasa Indonesia. Inisiasi ini pada akhirnya menjadi media diplomasi yang digunakan oleh Indonesia dan didukung melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui berbagai skema. Namun, angka pelajar Bahasa Indonesia di kawasan Australia terus menunjukkan penurunan. Penurunan ini mengarah pada penutupan dan pembatalan program studi Bahasa Indonesia di berbagai lembaga pendidikan yang diyakini disebabkan oleh berbagai faktor.

Melalui penelitian ini maka peneliti berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan **“Bagaimana pelaksanaan *multi-track diplomacy* terhadap Australia melalui program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) pada lembaga pendidikan di Australia tahun 2015-2020?”**

Dengan itu, dikarenakan adanya keterbatasan terhadap data yang dapat diakses oleh peneliti serta adanya perubahan badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam agenda pelaksanaan BIPA maka peneliti memfokuskan penelitiannya pada tahun 2015-2020. Hal ini sejalan dengan data yang penulis peroleh dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa selaku badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan BIPA sejak tahun 2014.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi bagaimana upaya internasionalisasi Bahasa Indonesia melalui program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) terhadap para pelajar di Australia pada lembaga pendidikan sebagai bagian dari diplomasi *track five* Indonesia.

#### **1.3.1. Tujuan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan edukasi Bahasa Indonesia dalam lembaga pendidikan di Australia, khususnya pada tahun 2015-2020 sebagai bagian dari *track five* dalam *multi-track diplomacy*.

#### **1.3.2. Tujuan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa hubungan internasional yang memiliki ketertarikan dalam program Bahasa Indonesia

untuk Penutur Asing (BIPA) atau pun edukasi bahasa sebagai bagian dari pelaksanaan *multi-track diplomacy* serta diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk materi BIPA maupun diplomasi publik Indonesia di masa yang akan datang.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang serta memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait pelaksanaan pengajaran Bahasa Indonesia sebagai bagian dari strategi diplomasi *track five* Indonesia terhadap para pelajar di Australia.

##### **1.4.2. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan data yang akurat bagi studi hubungan internasional khususnya dalam penerangan aspek diplomasi *track five* melalui pelaksanaan program BIPA terhadap para pelajar di Australia.

#### **1.5. Sistematika Penelitian**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I, peneliti menjelaskan mengenai latar belakang terkait mengapa penelitian ini cukup signifikan dan dapat diteliti. Oleh karena itu, peneliti menuliskan berbagai poin penting di dalamnya. Di dalam bagian ini, peneliti menjelaskan secara substansial serta penjelasan singkat mengenai hubungan bilateral Indonesia-Australia, inisiasi pengajaran Bahasa Indonesia oleh pemerintah Australia, pergeseran serta perluasan jalur diplomasi atau *multi-track diplomacy*, pelaksanaan program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) sebagai bagian dari *track five* dalam *multi-track diplomacy* Indonesia, serta penurunan pengajaran Bahasa Indonesia di lembaga pendidikan Australia. Peneliti juga menuliskan 11 penelitian terdahulu terkait diplomasi melalui kebudayaan, *multi-track diplomacy*, diplomasi bahasa sebagai bagian dari *soft diplomacy*, pelaksanaan program BIPA, serta hubungan kerjasama Indonesia-

Australia dalam sektor pendidikan yang menjadi referensi atau landasan awal bagi peneliti dalam penelitian. Terakhir, peneliti juga menuliskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian pada BAB I.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam BAB II, peneliti menjabarkan mengenai tinjauan pustaka yang relevan dengan konsep maupun teori pembahasan yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian. Kemudian, peneliti menjelaskan mengenai teori dan konsep yang digunakan sebagai acuan di dalam pelaksanaan penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori dan konsep penelitian yaitu *multi-track diplomacy* serta *language as power* di dalam Hubungan Internasional dengan harapan dapat mempermudah peneliti dalam analisis penelitian di dalam BAB ini. Terakhir, terdapat pula alur pemikiran untuk mempermudah memahami konsep atau alur pembahasan dalam penelitian ini.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada BAB ini peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Peneliti akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, sumber data baik secara primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data baik secara langsung maupun tidak langsung, serta analisis data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan, menyaring dan menyimpulkan informasi-informasi mengenai topik pembahasan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu, pada BAB ini peneliti juga menjabarkan tabel rencana waktu penelitian.

## **BAB IV GAMBARAN PERKEMBANGAN BAHASA INDONESIA DI AUSTRALIA**

BAB ini berisikan penjelasan mengenai upaya internasionalisasi Bahasa Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia di Australia, strategi NALSAS sebagai inisiasi pertama pemerintah Australia dalam mendukung pengajaran

Bahasa Asia di kawasan serta pencapaian program NALSAS dalam mendukung pengajaran Bahasa Indonesia.

## **BAB V DIPLOMASI BUDAYA INDONESIA MELALUI BAHASA INDONESIA DI AUSTRALIA**

BAB ini akan membahas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa selaku penanggung jawab dalam pelaksanaan BIPA, pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) sebagai bentuk *multi-track diplomacy* khususnya *track five* melalui edukasi pada sektor kebudayaan di lembaga pendidikan Australia. Serta hambatan dalam pelaksanaan Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing di kawasan Australia yang mengarah pada penurunan jumlah pelajar di lembaga pendidikan Australia.

## **BAB VI PENUTUP**

BAB ini akan menjadi penutup dari penelitian ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**